



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2016 – 2017
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 26 Juli 2017
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 15.30 WIB s.d 18.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: - Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017; - Pembahasan rincian program masing-masing unit Eselon I Kementerian Perhubungan dalam RAPBN TA 2018.
Ketua Rapat	: Dr. Michael Wattimena, SE, MM
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Perhubungan Darat, Plt Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 15.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat, Plt Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan pada hari ini adalah evaluasi pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017; dan pembahasan rincian program masing-masing unit Eselon I Kementerian Perhubungan dalam RAPBN TA 2018.
3. Ketua Rapat mempersilakan Dirjen Perhubungan Darat, Plt Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI dapat menerima penjelasan Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan mengenai capaian terhadap *target* pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta agar Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan melakukan upaya untuk peningkatan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017.
2. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

No.	Unit Kerja	PAGU KEBUTUHAN (Surat Menhub KU.002/12/15/PHB 2017 Tgl 31 Maret 2017)	PAGU INDIKATIF (Surat Bersama Bappenas-Kemenkeu: Pagu Indikatif Tahun 2018 No. S-398/MK.02/2017 & B.193/M.PPN/D.8/KU.01.0 1/05/2017 Tgl 9 Mei 2017)	USULAN PENYESUAIAN PAGU INDIKATIF TA 2018 (Surat Menhub No. KU.002/18/18PHB 2017 Tgl 26 Mei 2017)
1.	Perhubungan Darat	13.816.864.996	4.089.117.385	4.582.007.686
2.	Perkeretaapian	45.804.109.928	17.420.572.530	17.594.763.606
3.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	507.942.011	124.585.304	204.744.255

3. Sebagai tindaklanjut Rapat Kerja tanggal 5 Juli 2017, maka Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan bersedia untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA-K/L masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan saran dan pendapat Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2018.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB.

Jakarta, 26 Juli 2017

KETUA RAPAT,


MICHAEL WATTIMENA

DIRJEN HUBDAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,


PUDJI HARTANTO ISKANDAR

PLT. DIRJEN PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,


A. TONNY BUDIONO

KEPALA BPTJ
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,


BAMBANG PRIHANTONO